**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakannegara yang menjunjungtinggihukum yang berlandaskanpadaUndang-UndangDasar 1945 danberasaskanPancasila.SekaranginisetiapnegarasedangmelakukanpembangunansecaramenyeluruhbaikdarisegiinfrastrukturmaupunpadasektorpelayananmasyarakattakterkecualiBangsa Indonesia.Untukmelaksanakanpembangunan yangpesatdanmenyeluruhdalamkehidupannasionalmakadiperlukandukungandanperansertaseluruhpotensimasyarakat. Agar dalam proses pembangunanselanjutnyadapatberjalanlancardiperlukanadanyahubungan yang selaras, serasidanberimbangantarapemerintahdenganmasyarakat. Pembangunan Nasionalmerupakansuatupembangunan yang terusberkelanjutandansalingberkesinambungan yang padadasarnyadilakukanolehmasyarakatbersama-samadenganpemerintah.

Pelaksanaanpembangunannasionalperludana yang cukupbesaruntukmembiayaipengeluaranrutinproyekpembangunan. Untukmencapaikeberhasilanpembangunannasionaltidakterlepasdarikeberhasilanpembangunan di daerah.Pembangunan daerah yang terpadudanserasimewujudkanpembangunannasional yang berwawasannusantara. Salah satucarauntukmencapaitujuantersebutdenganupayaperbaikandanpenyempurnaandalampengelolaankeuangandaerah yang berasaldaripendapatanaslidaerah (PAD) dandikelolasecaraefektifdanesfisien. Kemampuankeuangansuatudaerahdilihatdaribesarkecilnyarealisasi PAD.Berdasar Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusitersebut PajakDaerahmenurutwilayahpemungutannyadibagimenjadipajakprovinsidanpajakkabupaten/kota. PajakProvinsiadalahpajakdaerah yang dipungutolehpemerintahdaerahtingkatprovinsi. Yang terdiridari :

DinasPendapatan Daerah (DIPENDA) atau yang sekarangbergantimenjadiDinasPendapatandanPengelolaanAset Daerah (DPPAD) yang menjadidinas yang mengelolaPendapatanAsli Daerah (PAD). Pajakdaerahmenurutwilayahpemungutannyadibagimenjadipajakprovinsidanpajakkabupaten/kota.PajakProvinsiadalahpajakdaerah yang dipungutolehpemerintahdaerahtingkatprovinsi. Yang terdiridari :

1. PajakKendaraanBermotordanKendaraan di Atas Air
2. Bea BalikNamaKendaraanBermotordanKendaraan di atas Air
3. PajakBahanBakarKendaraanBermotor
4. PajakPengambilandanPemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

DinasPendapatan Daerah (DIPENDA) atau yang sekarangbergantimenjadiDinasPendapatandanPengelolaanAset Daerah (DPPAD)Provinsi Jawa Tengahmerupakan salah satu SatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai intansi penghasil dan pemungut pendapatan daerah.

Salah satuPendapatan Asli Daerah yang di kelola oleh DPPAD adalah Pajak Daerah. Sedangkan dari sektor Pajak Daerah yang sangat dominan dan memiliki peran paling besar saat ini terhadap Pendapatan Asli DaerahadalahPajakKendaraanBermotor (PKB). Berdasarkanlaporanrealisasipendapatandaerah DPPAD ProvinsiJawa Tengah daritahun 2011-2015 penerimaanpajakdaerahkhususnyapajakkendaraanbermotor (PKB) mempunyaipotensi yang palingtinggi untukpenerimaan PAD.Pajakkendaraanbermotordipungutataskepemilikandanataukepenguasaankendaraanbermotorsekaligusmenjadiobyekpajak, dansubyekpajaknyayakni orang pribadimaupunbadanselakupemilikkendaraanbermotor.

Berdasarkan PP No 65 tahun 2001 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah definsikendaraanbermotoradalahsemuakendaraanberodaduaataulebihbesertagandengannya yang digunakan di semuajalandarat, dandigerakanolehperaltateknikberupa motor atauperalatanlainnya yang berfungsiuntukmengubahsuatusumberdayaenergitertentumenjadi energy tenagagerakkendaraanbermotor yang bersangkutan, termasukalat-alatberat da alat-alatbesar yang digerakkan. Termasukdalamobyek PKB adalahkepemilikandanataupenguasaankendaraanbermotor yang digunakansemuajalandarat, antaralain, di kawasanbandara, pelabuhanlaut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, danataupenguasaankendaraanbermotormeliputikepemilikandanataupenguasaankendaraanbermotor yang terdaftar di daerahprovinsiyang bersangkutan; kepemilikandanataupenguasaankendaraanbermotor di daerahprovinsiselamajangkawaktutertentu, misalnya 90 hariberturut-turut, alat-alatberatdanalat-alatbesarseperti; tractor, wheel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper sertajeniskendaraandaratlainnyasepertikeretagandeng.

Meskipun PKB menjadi penopang utama PAD namunmasih terdapat beberapa permasalahan proses pembayaranPKB. Salah satumasalah yang saat ini perlu adanya solusi atau jalan keluar adalahpenunggakanpembayaranPajakKendaraanBermotor, dimana selama kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah tunggakan PKB semakin meningkat.Berdasar Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secaraumumtunggakanPKBtimbulatau ditetapkan pada saat berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak belum melakukan pembayaran PKB.

Salah satuupaya yang dilakukan yang dilakukan oleh DPPAD dalampenanggulanganpermasalahanpenunggakanpajakkendaraanbermotoradalahdengankegiatanOptimalisasi Pajak Daerah melalui kegiatan menyampaikan surat ketetapan pajak daerah, penagihan dan memberikan peringatan kepada wajib pajak. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara Door to Door. Door to Doordengan mendatangi langsung ke rumah wajib pajak.KegiataniniadalahtindaklanjutdarisuratedaranKepalaDinasPendapatandanPengelolaanAset Daerah ProvinsiJawa Tengah No: 378/0638 tanggal 8 Januari 2014 tentangAnggarankegiatanbidangpajakpadatahunanggaran 2014 berkaitandenganKegiatanOperasionalpotensitunggakanPajakKendaraanBermotor.

Pada “*KeputusanKepalaDinasPendapatandanPengelolaanAset Daerah ProvinsiJawa Tengah No: 973/7630 tentangPetunjukTeknisPemungutanPajakKendaraanBermotordan Bea BalikNamaKendaraanBermotor*” merupakanpedomanbagiDinasPendapatanPengelolaanAset Daerah Jawa Tengah yang berisisyarat, jenis, carapemungutansertadendaatausankipenunggakanPajakKendaraanBermotor. TunggakanPajakKendaraanBermotordaritahunketahunmengalamikenaikanmenjadiperhatiankhususDinasPendapatandanPengelolaanAset Daerah ProvinsiJawa Tengah.Denganpenyelenggaraanpelayananpublik yang transparandanakuntabelsertaefektifdanefisienuntukmenyelesaikantunggakanpajakkendaraanbermotor, diantaranyadengankegiatanOperasional Door To Door.

Berdasarkanhaldiatas, makapenulistertarikmelakukanpenelitianpadaDinasPendaptandanPengelolaanAset Daerah Jawa Tengah denganjudul “***TINJAUAN KEGIATAN DOOR TO DOOR TERHADAP PEMBAYARAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN dan PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH*** ”